

Pengaruh Persepsi Penyerapan APBD terhadap Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang

Mardalaila¹, Muspa^{2*}, Rachman Suwandaru²

¹ Pemerintah Kabupaten Enrekang, Indonesia

² Program Pasca Sarjana IBK Nitro, Makassar, Indonesia

*Correspondent Email: muspa69@yahoo.co.id

Abstrak

Dalam Penelitian ini tujuan penelitian yang ingin dicapai apakah partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan SPIP berpengaruh terhadap kinerja keuangan di kantor BPBD Pemerintah Kabupaten Enrekang. Dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan menggunakan aplikasi SPSS dengan menggunakan sample jenuh responden yang diwawancarai sebanyak 30 orang yang meliputi karyawan di BPBD Kabupaten Enrekang. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa Partisipasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pada Kantor BPBD Kantor BPBD Kabupaten Enrekang, Kejelasan Anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang, Umpan Balik Anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang. Evaluasi Anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang. Sistem Intern Pengendalian Pemerintah berpengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci: Karakteristik Anggaran, Kinerja Keuangan, Enrekang.

Abstract

In this study, the research objectives to be achieved are whether budget participation, clarity of budget targets, budget feedback, budget evaluation, and SPIP have an effect on financial performance at the BPBD office of the Enrekang Regency Government. By using the multiple linear regression method and using the SPSS application by using a saturated sample of respondents who were interviewed as many as 30 people including employees at BPBD Enrekang Regency. The Result of this research found that Budget Participation had a positive and significant effect on Financial Performance at the Regional Government BPBD Office of Enrekang Regency, Budget Clarity had a positive and insignificant effect on Financial Performance of the Enrekang Regency Government, and Budget Feedback had a positive effect. and not significant to the Financial Performance of the Enrekang Regency Government. Budget evaluation has a positive and insignificant effect on the Financial Performance of the Enrekang Regency Government. The Internal System of Government Control has a negative and insignificant effect on the Financial Performance of the Enrekang Regency Government.

Keywords: Budget Characteristics, Financial Performance, Enrekang

1. Pendahuluan

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Asas otonomi memberikan keleluasaan kepada kepala daerah baik di provinsi, kabupaten maupun kota untuk mengelola sumber daya yang dimiliki

supaya tujuan pemerintahan dapat tercapai. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kantor BPBD menyebutkan pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Kantor BPBD diharapkan dapat mencapai tujuannya melalui penyerapan anggaran yang maksimal karena setiap daerah dapat memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimilikinya.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan Negara. Menurut Bastian (2006), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan pengejawantahan rencana kerja Kantor BPBD dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 menyebutkan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran juga merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Di Indonesia, lambatnya penyerapan anggaran menjadi masalah klasik yang terus terjadi setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Fenomena ini juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. sebagai gambaran selama periode tahun anggaran 2012-2015, demikian pula di laporan realisasi anggaran Kantor BPBD mencatat hampir setiap tahun anggaran ada dana yang tidak terealisasi di kas daerah.

Kegagalan target penyerapan anggaran berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (Fisu dkk, 2020). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran antara lain perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi. Perencanaan merupakan unsur penting di dalam organisasi.

Perencanaan menentukan semua aktivitas yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk merealisasikan perencanaan dibutuhkan anggaran. Anggaran merupakan cetak biru untuk gambaran, tindakan dan formalitas dari proses perencanaan (Dharmanegara, 2010). Sebagaimana hasil laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013) bahwa besar kecilnya tingkat penyerapan belanja daerah dalam mendanai pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan anggaran. Penelitian Sukadi (2012), membuktikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan dalam internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran).

Kedua hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran. Penelitian

Kuswoyo (2011) membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Untuk mempercepat penyerapan anggaran, pemerintah mengatur tata cara pengadaan barang jasa dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan pengadaan barang jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang jasa. Penelitian Sukadi (2012), membuktikan bahwa pengadaan barang jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Anggaran di sektor publik berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan (Halim dan Kusufi, 2012).

Komitmen manajemen didefinisikan sebagai kegiatan melakukan dan mempertahankan perilaku yang membantu bawahan untuk mencapai suatu tujuan (Alfian, 2016). Komitmen manajemen yang tinggi dapat menjadi dasar untuk intervensi sehingga organisasi dapat mencapai penyerapan anggaran secara maksimal. Komitmen manajemen dapat mempengaruhi kinerja organisasi (Antoro, 2014). Penelitian Juliani (2014) membuktikan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Eisenstadt (1959) menyatakan bahwa birokrasi dapat dipandang sebagai sebuah lambang rasionalitas dan implementasi yang efisien dari tujuan dan penyediaan layanan. Lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lancar. Namun jika lingkungan birokrasi tidak mendukung kegiatan organisasi maka akan menghambat kinerja organisasi (Eisenstadt, 1959). Oleh karena itu, lingkungan birokrasi akan mempengaruhi penyerapan anggaran. Penelitian Juliani (2014) membuktikan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Berdirinya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Enrekang diawali dengan berdirinya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai induk dari BPBD. Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah: a) Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan resiko bencana (pra-bencana), tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, b) Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi, c) Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana.

Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah. Pemerintah pusat menyarankan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus

berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) dan BNPB. Saat ini semua provinsi diwajibkan untuk membentuk BPBD. Berdirinya BPBD mengindikasikan komitmen untuk memperbaiki penanggulangan bencana yang difokuskan kepada kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008, Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2007, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008, tugas Penanggulangan Bencana yang memainkan peran utama sebelum bencana, pada saat bencana dan sesudah bencana, diatur di dalam 3 (tiga) bidang di BPBD Kabupaten Enrekang, yaitu : a) Pencegahan dan Kesiapsiagaan, b) Kedaruratan dan Logistik, c) Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut, maka ASN di kantor BPBD Kabupaten Enrekang diharapkan mampu memahami penyerapan anggaran APBD semaksimal mungkin agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan dengan tujuan melihat Pengaruh Persepsi Penyerapan APBD Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang.

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisis data dengan bentuk angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data statistik deskriptif (Irwan & Haryono, 2015). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengujian hipotesis menggunakan perhitungan sistematis dengan menggunakan rumus statistik untuk menguji hubungan antara variabel yang akan diteliti dan akan menghasilkan kesimpulan dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai ASN dan Tenaga Sukarela/Kontrak yang bekerja di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Enrekang. Alasan penentuan objek penelitian ini karena letaknya yang mudah dijangkau oleh peneliti sehingga dapat memudahkan pelaksanaan penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sample jenuh dimana populasi dan sampelnya mempunyai besaran yang sama yakni 16 orang ASN dan 40 orang tenaga sukarela/ kontrak. Kriteria penelitian ini adalah pegawai atau Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Sukarela/Kontrak yang bekerja di Kantor BPBD Kabupaten Enrekang.

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah dengan mengambil data tahunan terhadap objek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah data Data Partisipasi Anggaran, Kejelasan Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran, SPIP dan Kinerja Keuangan kantor BPBD Kabupaten Enrekang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Adapun pengujian-pengujian yang dilakukan dalam penelitian yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji regresi berganda, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji parsial (uji t), uji simultan (uji f), dan koefisien determinasi (Uji R^2).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Deskriptif Responden

Subyek dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara yang berada dalam lingkup Kantor BPBD Kabupaten Enrekang yang berjumlah sebanyak 30 responden. Berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, peneliti membagi karakteristik responden yaitu:

Tabel 3.1

Responden Berdasarkan Jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase
Pria	19	63%
Wanita	11	37%
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel 5.2 diatas, diketahui bahwa jumlah responden yaitu sebanyak orang dimana 19 orang adalah responden pria atau setara dengan 67% dari total responden sedangkan responden wanita juga sebanyak 11 orang atau 37% dari total responden. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) Kantor BPBD Kabupaten Enrekang yang menjadi subjek penelitian dominan Pria.

Tabel 3.2

Responden berdasarkan usia

Usia	Jumlah (Orang)	Presentase
<20-25	2	6.7%
≥26-30	8	26,6%
≥31-40	4	13,4%
>40	16	53,3%
Jumlah	94	100%

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan usia < 20-25 tahun sebanyak 2 orang atau 6.7%. Responden yang berusia ≥ 26-30 tahun sebanyak 8 orang atau 26,6%. Responden yang berusia ≥ 31-40 tahun sebanyak 4 orang atau 13,4%. Sedangkan usia > 40 tahun sebanyak 16 orang atau 53,3% dari total responden.

3.2 Hasil Analisis

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu Aparatur Sipil Negara yang berada dalam lingkup Kantor BPBD Kabupaten Enrekang. Jumlah kuesioner yang akan disebar sebanyak 30 lembar, atas data yang diperoleh nantinya terlebih dahulu akan di uji instrument kemudian akan dilakukan analisis regresi linier berganda.

a. Uji Instrument

1. Uji Validitas

Pada penelitian ini, pengujian validitas dengan mempertahankan tingkat korelasi pearson dengan tingkat signifikan 5%. Suatu instrument pengukur dinyatakan valid apabila nilai signifikan < 0,05 dan sebaliknya. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Signifikan	Keterangan
1	Kinerja Keuangan	0.000	Valid
2	Partisipasi Anggaran	0.000	Valid
3	Kejelasan Anggaran	0.000	Valid
4	Umpan Balik Anggaran	0.000	Valid
5	Evaluasi Anggaran	0.000	Valid
6	SPIP	0.000	Valid

Berdasarkan table 3.3 diatas, hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua variabel pernyataan valid karena memiliki nilai signifikan $< 0,05$

2. Uji Realibilitas

Siregar (2013) reliabilitas adalah ketepatan hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran. Uji Realibilitas dilakukan dengan uji *Alpha Cronbach* jika alat ukur telah dinyatakan valid koefisien *Cronbach Alpa* lebih besar atau sama dengan 0,6 maka instrument cukup realibel. Hasil uji realibilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Hasil Uji Realibilitas

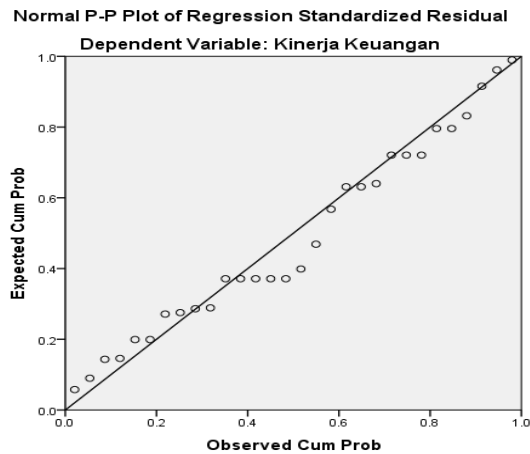
NO	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Kinerja Keuangan	0,865	Reliabel
2.	Partisipasi Anggaran	0,883	Reliabel
3.	Kejelasan Anggaran	0,853	Reliabel
4.	Umpan Balik Anggaran	0,864	Reliabel
5.	Evaluasi Anggaran	0,857	Reliabel
6.	SPIP	0,888	Reliabel

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, menunjukkan nilai koefisien Cronbach's Alpha lebih dari 0,6 berarti instrument variabel dalam pengukuran adalah realibel.

b. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan agar hasil estimasi yang diperoleh benar-benar relevan untuk untuk kemudian dianalisis. Uji normalitas data yang digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi, variable dependen, variable indenpenden atau keduanya mempunyai distribusi normal, dapat dilihat pada gambar 3.1 yang menunjukkan grafik P-P Plot.

Grafik ini menggambarkan distribusi frekuensi data, jika titik distribusi data berada pada sekitar garis lurus diagonal maka distribusi pengamatan sama dengan distribusi uji yang berarti bahwa terdistribusi secara normal. Pada grafik 5.1 tersebut terletak titik-titik distribusi disekitar garis lurus diagonal, sehingga dapat disimpulkkkan bahwa distribusii frekuensi data semua dengan distribusi uji, dengan demikian maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah penyebaran data mengikuti distribusi normal.



Gambr 3.1 Grafik Distribusi Normal

c. Analisis Regresi Linear Berganda

1. Model Regresi Linear

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Partisipasi anggaran, Kejelasan Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran, SPIP terhadap Kinerja Keuangan pada Kantor BPBD Kabupaten Enrekang. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.6 untuk itu dilakukan pengujian regresi dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e$$

Tabel 3.5

Uji Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	15.311	6.436		-2.379	.026		
Partisipasi Penyusunan Anggaran	.593	.158	.575	3.766	.001	.209	4.787
Kejelasan Sasaran Anggaran	.157	.281	.072	.559	.581	.290	3.449
Umpan Balik Anggaran	.679	.415	.243	1.636	.115	.221	4.526
Evaluasi Anggaran	.621	.372	.267	1.667	.108	.189	5.287
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	-.554	.281	-.229	-1.970	.060	.361	2.767

Dari table berikut 3.5 berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -15.311 + 0.593X_1 + 0.157X_2 + 0.679X_3 + 0.621X_4 - 0.544X_5$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Koefisien constant sebesar -15.311 yang berarti bahwa jika Variabel Partisipasi anggaran, Kejelasan Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan SPIP sama dengan 0, maka Kinerja Keuangan sebesar -15.311.
- 2) Koefisien regresi X_1 sebesar 0.593, berarti bahwa apabila Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran naik sebesar 1 satuan, maka Kinerja Keuangan meningkat sebesar 0.593 poin dengan syarat variable bebas lainnya konstan demikian pula sebaliknya.
- 3) Koefisien regresi X_2 sebesar 0.157, berarti bahwa apabila Variabel Kejelasan Anggaran naik sebesar 1 satuan, maka Kinerja Keuangan meningkat sebesar 0.157 poin dengan syarat variable bebas lainnya konstan demikian pula sebaliknya.
- 4) Koefisien regresi X_3 sebesar 0.679 berarti bahwa apabila Variabel Umpan Balik Anggaran naik sebesar 1 satuan, maka Kinerja Keuangan meningkat sebesar 0,679 poin dengan syarat variable bebas lainnya konstan demikian pula sebaliknya.
- 5) Koefisien regresi X_4 sebesar 0,621, berarti bahwa apabila Variabel Evaluasi Anggaran naik sebesar 1 satuan, maka Kinerja Keuangan meningkat sebesar 0,621 poin dengan syarat variable bebas lainnya konstan demikian pula sebaliknya.
- 6) Koefisien regresi X_5 sebesar -0,709, berarti bahwa apabila Variabel SPIP naik sebesar 1 satuan, maka Kinerja Keuangan menurun sebesar 0,709 poin dengan syarat variable bebas lainnya konstan demikian pula sebaliknya.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*R Square* atau R kuadrat) atau disimbolkan dengan " R^2 " yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variable bebas terikat atau variable independent (x) terhadap variable terikat atau variable dependent (Y), atau dengan kata lain, nilai koefisien atau R square (Y), ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variable X secara simultan (bersama-sama) terhadap variable Y .

Tabel 3.6
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.940 ^a	.883	.859	2.21480	2.197

Berdasarkan table 3.6 menunjukkan bahwa nilai *R Square Change* (koefisien derminasi) sebesar 0,883 yang artinya pengaruh seluruh variable independen (X) terhadap dependen (Y) sebesar 88.3 % dan 11,7 % diluar model.

3. Uji T

Hipotesis menguji variable independen yaitu pengaruh Partisipasi anggaran, Kejelasan Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran, SPIP terhadap Kinerja Keuangan pada Kantor BPBD Kabupaten Enrekang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Hipotesis Nol (H_0)

$H_0 : b_1 = 0$, besarnya b_1 tidak berada dari 0, maka pengaruh variable independen terhadap variable dependen nol atau tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien variable independen tidak signifikan.

b. Hipotesis Alternative (H_a)

$H_a : b_1 \neq 0$, besarnya b_1 tidak sama dengan nol, maka pengaruh variable independen terhadap variable dependen tidak nol, atau dengan kata lain ada pengaruh variable dependen, sehingga koefisien variable independen signifikan.

Berdasarkan table 3.6 di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Koefisien t hitung variable Partisipasi Anggaran (X_1) sebesar $3.776 > t$ tabel sebesar 1.697 yang berarti bahwa variabel Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y).
- 2) Koefisien t hitung variable Kejelasan Anggaran (X_2) sebesar $0.559 < t$ tabel sebesar 1.697 yang berarti bahwa variabel Kejelasan Anggaran berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y).
- 3) Koefisien t hitung variable Umpan Balik Anggaran (X_3) sebesar $1.636 < t$ tabel sebesar 1.697 yang berarti bahwa variabel Umpan Balik Anggaran berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y).
- 4) Koefisien t hitung variable Evaluasi Anggaran (X_4) sebesar $1.667 < t$ tabel sebesar 1.697 yang berarti bahwa variabel Evaluasi Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y).
- 5) Koefisien t hitung variable SPIP (X_5) sebesar $-1.970 < t$ tabel sebesar 1.697 yang berarti bahwa variabel SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y).

4. Uji F

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variable independen secara bersama-sama (simultan) memengaruhi variable dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variable bebas secara bersama-sama terhadap variable terikat. Tingkatatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan $F < 0.05$ maka dapat diartikan bahwa variable independent secara simultan mempengaruhi variable dependen atau sebaliknya. Uji simultan F (Uji Simultan) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simuktan antara variable independen terhadap variable dependen. Pengujian statistic Anova merupakan bentuk pengujian hipotesis dimana dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau sekelompok statistic yang disimpulkan.

Pengambilan keputusan dilihat dari pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai F ya g terdapat di dalam table ANPVA, tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05. Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya semua variable independe/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variable dependen/terikat.
- b. Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya semua variable independent/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

Tabel 3.7
ANOVA

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	889.739	5	177.948	36.276	.000 ^b
	Residual	117.728	24	4.905		
	Total	1007.467	29			
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan						
b. Predictors: (Constant) SPIP, Partisipasi Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Kejelasan Anggaran, Evaluasi Anggaran						

Berdasarkan table 3.7 dapat diperoleh keputusan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung yaitu sebesar 107.251. Sedangkan nilai signifikan yang dihasilkan yaitu 0,000 yang dimana lebih kecil 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak digunakan, dan variable independen yang meliputi SPIP, Partisipasi Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Kejelasan Anggaran, Evaluasi Anggaran memiliki pengaruh secara simultan terhadap variable dependen Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang.

d. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variable independen, jika terjadi autokolerasi maka diamankan multikolonieritas dapat terindikasi apabila terdapat hubungan linear antara variabel bebas yang digunakan dalam model dengan melihat *Tolerance value* dan *Varians Inflator Factor* (VIP). Dimana dalam *Tolerance value* biasanya adalah 0,10 sedangkan dalam VIP 10.

Berdasarkan table 3.5 menunjukkan nilai SPIP, Partisipasi Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Kejelasan Anggaran dan Evaluasi Anggaran memiliki pengaruh secara simultan, Persepsi Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang rata rata berada di atas 0.20 poin dengan demikian disimpulkan bahwa ketiga variable > 0,10 pada tabel 5.10 juga menunjukkan bahwa *Variance Infation Factor* (VIF) dari seluruh variable bebas yaitu < 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas dimana VIF untuk Partisipasi Anggaran sebesar 4,312, Kejelasan Anggaran 6,156, Umpan Balik Anggaran Sebesar 6,083, Evaluasi Anggaran sebesar 7.854, SPIP sebesar 3.201.

2. Uji Autokorelasi

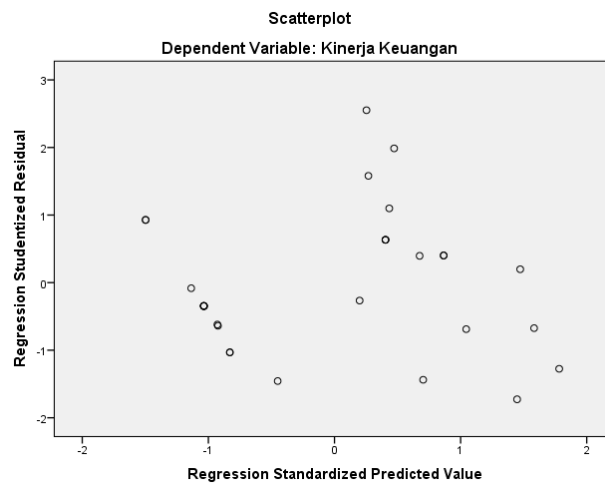
Uji autokorelasi bertujuan untuk memastikan bahwa dalam suatu model regresi linear berganda terdapat autokorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1 atau periode sebelumnya, sehingga diperoleh hasil regresi yang valid dan dapat digunakan untuk pengujian terhadap hipotesis yang diajukan. Pengujian autokorelasi ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin- Waston (DWE-test) dengan ketentuan:

- 1) Angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- 2) Angka DW di bawah -2 sampai +2, berarti tidak autokorelasi.
- 3) Angka DW di bawah +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Dari tabel 3.6 nilai DW sebesar 2.001 yaitu berada diantara nilai -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model Heteroskedastitas regresi bebas dari autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastitas

Heteroskedastitas merupakan ketidaksamaan variable pada semua pengamatan dan kesalahan yang terjadi yang memperlihatkan hubungan sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variable bebas sehingga kesalahan tersebut tidak random. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot. (Ghozali, 2011:139)



Gambar 3.2. Uji Heteroskedastitas

Berdasarkan gambar 3.2 dapat dilihat bahwa tidak adanya pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa dalam variable penelitian ini tidak terjadi heteroskedastitas.

3.3. Pembahasan

Adapun hasil pengujian antara variable dependen dengan variable independen dapat dianalisis dalam pembahasan berikut:

1. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan SPIP terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil uji simultan Partisipasi Anggaran, Kejelasan Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan SPIP secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang, Dan hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka 87,4 % yang Partisipasi Anggaran, Kejelasan Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan SPIP berpengaruh sebesar 88,3 % terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang sisanya sebesar 11,7% dipengaruhi oleh variable lain di luar dari penelitian ini. Serta melihat dari nilai signifikansi Uji F sebesar 0.000 yang berarti secara simultan variable X berpengaruh signifikan terhadap variable Y.

2. Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) menghasilkan nilai $0,001 < 0,05$ dan nilai B sebesar 0.593 maka H_0 ditolak dan H_a diterima dengan arah positif

dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang (Y). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Partisipasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan dikatakan diterima, artinya terdapat pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang.

Hasil ini menjelaskan bahwa persepsi responden Aparatur Sipil Negara di mengenai Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan pada Lingkup Kantor BPBD Kabupaten Enrekang sangat baik, yang berarti Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Enrekang memperoleh respon yang baik dalam Partisipasi Penyusunan Anggaran. Hasil penelitian serupa ditemukan oleh Achmad & Shaleh (2020) dengan penelitian yang berjudul Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Kantor BPBD Luwu Timur

Hasil analisis persamaan regresi maka diperoleh koefisien regresi sebesar 0,420, selain itu memiliki nilai sign. $0,000 < 0,05$, hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran pada Kantor Kantor BPBD di Kabupaten Luwu Timur. Menurut Bagus (2010) mengemukakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran adalah proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya.

Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh temuan empirik di lapangan bahwa pimpinan instansi harus memiliki alasan yang jelas saat melakukan revisi anggaran yang telah ditetapkan selama ini, kemudian setiap pimpinan Instansi pemerintah dituntut melibatkan pegawai dalam penyusunan anggaran tanpa ada diskriminatif sehingga pegawai termotivasi dalam penyusunan anggaran. Kemudian untuk menghasilkan anggaran berbasis kinerja, maka perlu ditunjang oleh adanya kontribusi atau peran dari setiap pegawai dalam penyusunan anggaran, begitu pula bahwa setiap pegawai diharapkan dapat menyampaikan pendapat atau gagasan dalam penyusunan anggaran, serta perlu frekuensi pemberian saran dan pendapat dalam penyusunan anggaran. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wibowo (2017) yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

3. Analisis Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Kejelasan Anggaran (X_2) menghasilkan nilai $0.581 > 0,05$ dan nilai B sebesar 0.157 maka H_0 diterima dan H_a ditolak dengan arah positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang (Y). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Kejelasan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan dikatakan ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang.

Hasil ini menjelaskan bahwa persepsi responden Aparatur Sipil Negara di mengenai Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Keuangan pada Lingkup Kantor BPBD Kabupaten Enrekang tidak mempunyai pengaruh, yang berarti Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Enrekang merasa tidak begitu paham dan mengetahui, karena tidak semua ASN di kantor BPBD Kab Enrekang dilibatkan dalam Kejelasan Sasaran Anggaran yang dilakukan oleh Kantor BPBD Kabupaten Enrekang.

Hasil penelitian serupa ditemukan oleh Gala (2017) tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kantor BPBD Kabupaten Gorontalo Utara baik secara simultan maupun secara parsial. Koefisien determinasi membuktikan secara keseluruhan pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan Partisipasi Anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 79.4%.

4. Analisis Pengaruh Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Umpan Balik Anggaran (X_3) menghasilkan nilai $0.115 > 0,05$ dan nilai B sebesar 0.679 maka H_0 diterima dan H_a ditolak dengan arah positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang (Y). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Umpan Balik Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan dikatakan ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh Umpan Balik Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang.

Hasil ini menjelaskan bahwa persepsi responden Aparatur Sipil Negara mengenai Umpan Balik Anggaran terhadap Kinerja Keuangan pada Lingkup Kantor BPBD Kabupaten Enrekang tidak mempunyai pengaruh, yang berarti Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Enrekang merasa tidak begitu memahami dan mengetahui Umpan Balik Anggaran karena tidak semua ASN di kantor BPBD dilibatkan perihal Umpan Balik Anggaran yang dilakukan oleh Kantor BPBD Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Sabri (2016) tentang Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Pengendalian Keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai.

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial hanya variabel umpan balik anggaran berpengaruh negative terhadap kinerja Pengendalian Keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya < 0.05 sedangkan variabel partisipasi anggaran, berbagi informasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran dan kecukupan anggaran berpengaruh positive terhadap kinerja pengendalian keuangan pemerintah kota Tanjung Balai hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya < 0.05 .

5. Analisis Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Evaluasi Anggaran (X_4) menghasilkan nilai $0.108 > 0,05$ dan nilai B sebesar 0.621 maka H_0 diterima dan H_a ditolak dengan arah positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang (Y). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Evaluasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan dikatakan ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang.

Hasil ini menjelaskan bahwa persepsi responden Aparatur Sipil Negara mengenai Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Keuangan pada Lingkup Kantor BPBD Kabupaten Enrekang tidak mempunyai pengaruh, yang berarti Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten

Enrekang merasa tidak begitu memahami dan mengetahui secara sistemik mengenai Evaluasi Anggaran yang dilakukan oleh Kantor BPBD Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Hadi (2013) dengan Judul Pengaruh Karakteristik Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD di BAPPEDA Kota Gorontalo.

Hasil penelitian membuktikan secara parsial karakteristik anggaran (X) yang terdiri dari partisipasi penyusunan anggaran (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2), umpan balik anggaran (X3), evaluasi anggaran (X4) serta tingkat kesulitan sasaran anggaran (X5) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kantor BPBD (Y). secara parsial partisipasi penyusunan anggaran (X1) yang memiliki pengaruh yang lebih besar yaitu 0.810 atau sebesar 81%, kemudian kejelasan sasaran anggaran (X2) memiliki pengaruh sebesar 0.559 (55.9%), yang ketiga tingkat kesulitan sasaran anggaran (X5) berpengaruh sebesar 0.417 (41.7%), Selanjutnya variabel evaluasi anggaran (X4) berpengaruh sebesar 0.399 (39.9%) dan yang terakhir variabel umpan balik anggaran (X3) memiliki pengaruh terendah yaitu sebesar 0.273 (27.3%).

6. Analisis Pengaruh SPIP Terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Sistem Intern Pemerintah (X₅) menghasilkan nilai $0.060 > 0,05$ dan nilai B sebesar -0.554 maka H_0 diterima dan H_a ditolak dengan arah negative dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang (Y). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Sistem Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan dikatakan ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh Sistem Intern Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang.

Hasil ini menjelaskan bahwa persepsi responden Aparatur Sipil Negara di mengenai SPIP terhadap Kinerja Keuangan pada Lingkup Kantor BPBD Kabupaten Enrekang tidak mempunyai pengaruh, yang berarti Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Enrekang merasa tidak begitu memahami dan mengetahui SPIP yang dilakukan oleh Kantor BPBD Kabupaten Enrekang dikarenakan keterlibatan ASN terkait dengan SPIP masih minim dan masih berada pada unsur pimpinan sehingga persepsi responden dalam hal ini mempunyai dampak yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangannya. Hasil penelitian yang serupa ditemukan Bela, Agustin Putri Sinta (2019) Pengaruh Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Serta Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Dringu).

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas pada semua variabel dinyatakan valid dan reliabel. Hasil analisis secara simultan menunjukkan bahwa variabel transparansi (X1), sistem pengendalian intern pemerintah (X2), dan akuntabilitas (X3) terdapat pengaruh secara simultan terhadap variabel kinerja keuangan (Y). Hal ini terbukti dengan hasil perhitungan uji f , yang menyatakan bahwa nilai f hitung sebesar $12,419 > f$ tabel sebesar $2,86$ dengan taraf sig $0,000 < 0,05$ atau 5% sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa Transparansi (X1) dengan signifikan sebesar $0,033 < 0,05$ dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2) signifikan sebesar $0,035 < 0,5$ serta Akuntabilitas (X3) signifikan sebesar $0,022 < 0,05$ yang mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan (Y) pada Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan taraf sig 5%. Sedangkan

variabel yang berpengaruh secara dominan terhadap kinerja keuangan (Y) adalah variabel akuntabilitas (X3) dengan beta sebesar 0,339.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran, Kesulitan Sasaran dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang. Dari hasil Analisa data diperoleh bahwa (1) Partisipasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang; (2) Kejelasan Anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang. (3) Umpan Balik Anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang. (4) Evaluasi Anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang. (5) Sistem Intern Pengendalian Pemerintah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang. (6) Secara Simultan Partisipasi Anggaran, Kejelasan Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Enrekang.

5. Daftar Pustaka

- Achmad, J., & Saleh, H. (2020). Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Luwu Timur.
- Antoro, D. (2014). Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Komitmen Manajemen Puncak terhadap Transfer Knowledge dan Dampaknya terhadap Kinerja Dosen. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 21(2).
- Alfian, F. A. (2016). *Komitmen Manajemen Puncak Dan Manajemen Proyek Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi* (Doctoral dissertation, STIE Ekuitas).
- Bagus, I.A. (2017). *Penganggaran Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bela, A. P. S. (2019). *Pengaruh Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Serta Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Dringu)* (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga Probolinggo).
- Dharmanegara, I. B. (2010). *Penganggaran Perusahaan: teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Fisu, A. A., Didiharyono, D., & Bakhtiar. (2020). Economic & Financial Feasibility Analysis of Tarakan Fishery Industrial Estate Masterplan. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 469, No. 1, p. 012002). IOP Publishing.
- Gala, G. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi, Universitas Gorontalo*

- Hadi, S. S. (2012). Pengaruh Karakteristik Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Gorontalo). *Skripsi*, 1(921409164).
- Halim, A. dan S. Kusufi. (2012). Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat
- Irwan, I., & Haryono, D. (2015). Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Teoritis dan Aplikatif). Bandung Alfabeta
- Juliani, D. (2014). *Pengaruh Komitmen Manajemen, Pengetahuan Peraturan, Lingkungan Birokrasi, dan Pengawasan Keluaran terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Kuswoyo. (2011). Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja diakhir Tahun Anggaran (Studi Pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri). Tesis- Universitas Gajah Mada.
- Sabri, A. (2013). *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Pengendalian Keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai*. Diss. UNIMED
- Sukadi. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Akhir Tahun Anggaran*. Tesis Universitas Gajah Mada.